

## **ABSTRACT**

### **COORDINATION DEPARTMENT TRANSPORTATION IN IMPROVING SERVICES OF TRANSPORTATION CITIES (PUBLIC TRANSPORTATION) IN BANDAR LAMPUNG**

**By**

**Pranita Miharti**

The coordination Department Transportation in improving services of transportation cities in Bandar Lampung is regulated in the Decision Walikota Bandar Lampung No. 40/ 12/ HK/ 2011 about the establishment of forum traffic and transport way in the city Bandar Lampung. In the decision of Department Transportation coordination with DPC Organda and Polresta in improving transport services in the city Bandar Lampung. Coordination is done because look the number of transport in Bandar Lampung much, a bad transport service and not a good public transportation in diving in Bandar Lampung.

This study purpose to describe and analyze the coordination Department Transportation in the city transport services, and to see the factors that inhibit of Department Transportation in coordinating improving the service of urban transport. The method used in this research is qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation.

The results of research from the coordination Department Transportation in improving urban transport services in Bandar Lampung can be seen through seven effective coordination indicators, namely: managerial hierarchy, rules and procedures, plans and goal setting, vertical information systems, horizontal relationships, creation of additional resources and the creation of stand-alone tasks. Based on these indicators indicate that the coordination conducted by the Transportation Department in improving public transportation services has run optimally. This is because of the seven indicators, one indicators of which have not run well. And also there are obstacles in the coordination is a rare coordination meeting and the form of business transport is still in the form of individual business. The recommendations that researchers provide, namely the creation of a more innovative one of them making uniform for angkot drivers, angkot controls that must be frequently implemented, making the implementation schedule coordination meeting.

**Keywords: Coordination, Public Service, Public Transport Urban.**

## **ABSTRAK**

### **KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Pranita Miharti**

Koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota di Bandar Lampung diatur dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 40/ 12/ HK/ 2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kota Bandar Lampung. Dalam keputusan tersebut Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan DPC Organda dan Polresta dalam meningkatkan pelayanan angkot di Kota Bandar Lampung. Koordinasi ini dilakukan karena melihat jumlah angkot di Bandar Lampung yang banyak, pelayanan angkot yang buruk dan tidak teraturnya angkot dalam berkendara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis koordinasi Dinas Perhubungan dalam pelayanan jasa transportasi angkutan kota, dan untuk melihat faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan dalam berkoordinasi meningkatkan pelayanan angkutan kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian dari koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota di Bandar Lampung dapat dilihat melalui tujuh indikator koordinasi yang efektif, yaitu : hierarki manajerial, aturan dan prosedur, rencana dan penetapan tujuan, sistem informasi vertikal, hubungan-hubungan horizontal, penciptaan sumberdaya tambahan dan penciptaan tugas-tugas yang berdiri sendiri. Berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkot sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan dari tujuh indikator, hanya satu indikator yang belum berjalan dengan baik. Selain itu terdapat kendala dalam melakukan koordinasi tersebut yaitu rapat koordinasi yang jarang dilaksanakan dan bentuk usaha angkutan yang masih berbentuk usaha perorangan. Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu penciptaan perencanaan yang lebih berinovasi salah satunya pembuatan seragam bagi pengemudi angkot, pengawasan angkot yang harus sering dilaksanakan, pembuatan jadwal pelaksanaan rapat koordinasi.

**Kata Kunci : Koordinasi, Pelayanan Publik, Transportasi Publik Perkotaan**